

Kebijakan Percepatan Pembangunan

1. Peraturan dan perundangan yang mendukung percepatan pembangunan jalan tol.
2. Perkuatan kerangka kerja institusi dan pengaturan jalan tol melalui pembentukan BPJT sebagai badan regulator di bidang jalan tol.
3. Terbentuknya Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang diketuai oleh Menko Perekonomian.
4. Perjanjian Pengusaha Jalan Tol yang "bankable" dan "investor friendly".
5. Formulasi sistem yang tepat untuk penyesuaian tarif tol.
6. Pengelolaan resiko pembebasan tanah dengan penyiapan mekanisme Revolving Fund melalui Badan Layanan Umum (BLU)-BPJT dan Land Capping.